

MONOGRAFI HUKUM

BUKU

HUKUM KEUANGAN NEGARA

- ABSTRAK :**
- Bahwa dinamika era reformasi serta maraknya praktik kebocoran dan penyimpangan pengelolaan keuangan negara bernilai triliunan rupiah di tengah kondisi defisit anggaran, berakar dari kelemahan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum pengelolaan keuangan dan aset negara yang tegas, bersih dari korupsi, serta berorientasi pada kepentingan bersama dan kedaulatan rakyat.
 - Dasar hukum yang melandasi kajian hukum keuangan negara dalam literatur ini mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Indische Comptabiliteitswet (ICW) 1925, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Materi pokok yang dibahas menekankan pentingnya reformasi perundang-undangan keuangan negara agar landasan hukum yang dibentuk tidak ditujukan untuk kepentingan jangka pendek elit tertentu, melainkan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Pemikiran ini memformulasikan keseimbangan antara kesatuan negara dengan kemajemukan bangsa melalui pengakuan dan pembentukan badan hukum publik (seperti daerah) maupun badan hukum perdata (seperti perseroan terbatas). Selain itu, ditegaskan bahwa fungsi negara dan pemerintah adalah melayani kepentingan umum, sehingga seluruh regulasi di bidang keuangan negara harus mampu mengutamakan dalam satu kesatuan bangsa yang utuh.
- Catatan:**
- Mengenai kedudukan regulasi yang diulas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah berlaku sejak disahkan pada tanggal 9 Maret 2003 sebagai pembaharuan atas peraturan perundang-undangan sektor keuangan era kolonial. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan aturan pelaksanaan teknis lebih lanjut (seperti PP dan Peraturan Menteri) agar dapat berjalan efektif. Peraturan paket keuangan negara ini mencabut dan

menggantikan aturan perundang-undangan lama yang tidak lagi relevan (seperti Indische Comptabiliteitswet), serta membuka ruang untuk dilakukan perubahan/revisi di masa depan jika perkembangannya menuntut penyesuaian. Naskah kajian ini bersumber dari Kata Pengantar dan Daftar Pustaka buku karangan Adrian Sutedi, S.H., M.H. total terdapat 405 halaman.